

PERAN MP3EI BERBASIS "NOT BUSINESS AS USUAL" UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Hardiansyah Nur Sahaya dan Ali Arto

Universitas Negeri Semarang
(Hardiansyahnursahaya@gmail.com)

Diterima : 25 Mei 2011, Disetujui: 15 Juni 2011

ABSTRACT

Indonesia, as a developing country, is currently facing a tremendous challenge. Global era can be an opportunity, a challenge, as well as a threat. In this globalization era, known as economic liberalization or free trade in services in particular labor. Indonesian workers are expected to be able to compete with workers from other countries. To meet the challenges of globalization workforce, the government has prepared MP3EI (Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) which is not based on common business. MP3EI is a government program that is made by considering the various advantages and potential, as well as the development challenges that Indonesia must face. However, in the implementation of the strategic role of MP3EI, there are still problems in terms of human resources, science and technology. Education focuses mainly on Java, less access to education, use of science and technology training, lack of infrastructure investment training. Therefore, we need a concrete solution in optimizing regional autonomy to address the education gap in each corridor, develop the concept of "one corridor, one potential school corridor". This concept is expected to optimize each economic corridor, regeneration and gradual training for cadres training centers, increasing government and private partnership (PPP) in infrastructure investment in training through the implementation of regional autonomy.

Keywords: MP3EI, Quality Competitiveness, Employment, Era of Globalization

ABSTRAK

Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun, saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Era global dapat menjadi peluang, tantangan, sekaligus juga menjadi ancaman. Dalam era globalisasi yang dikenal dengan liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia dituntut harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Untuk menjawab tantangan globalisasi tenaga kerja yang ada, pemerintah telah menyiapkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) berbasis not business as usual. Dimana MP3EI merupakan program pemerintah yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan dan potensi yang dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus Indonesia hadapi. Akan tetapi dalam pelaksanaan peran strategis MP3EI ini masih terdapat kendala dalam segi kemampuan SDM dan IPTEK seperti, masih terfokusnya pendidikan di koridor ekonomi Jawa, masih lemahnya akses pendidikan di masing-masing koridor, rendahnya kaderisasi pelatihan, rendahnya penggunaan IPTEK dalam pelatihan, rendahnya investasi infrastruktur pelatihan. Oleh karena itu diperlukan solusi nyata seperti optimalisasi otonomi daerah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di masing-masing koridor, mengembangkan konsep "one corridor one potential school" untuk mengoptimalkan masing-masing koridor ekonomi, regenerasi kader dan pelatihan bertahap untuk calon kader pelatih balai latihan kerja (BLK), meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam investasi infrastruktur pelatihan melalui implementasi otonomi daerah.

Kata Kunci: MP3EI, Kualitas Daya Saing, Penyerapan Tenaga Kerja, Era Globalisasi

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia saat ini merupakan suatu entitas yang perlu menda-

patkan perhatian serius karena terjadinya berbagai macam pergeseran peadaban manusia yang jika

tidak cermat didalam mengantisipasinya, maka Indonesia akan terjebak dalam suatu keadaan yang belum tentu sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi bangsa, pergeseran tersebut harus disikapi dengan lebih selektif terutama didalam mengantisipasinya.

Globalisasi bukan lagi menjadi isu tetapi sudah menjadi kenyataan yang dihadapi oleh semua bangsa, hampir-hampir batas negara sudah tidak ada lagi kecuali dalam batas kedaulatan. Namun dari aspek-aspek ekonomi hampir dunia ini telah menjadi satu sistem yang terbuka, saling terkoneksi, dan saling ketergantungan antar negara. Tidak ada negara manapun yang mampu menutup diri, semua berkesempatan untuk dapat saling berinteraksi dan berintegrasi dalam pergaulan global. Negara-negara maju dapat mengambil keuntungan lebih besar dibanding dengan negara berkembang dalam konteks memanfaatkan peluang yang ada dipasar global ini. Negara maju dapat mengatur dan mendikte, karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah dikuasai sehingga dapat menciptakan ketergantungan bagi negara berkembang.

Terkait dengan globalisasi, Indonesia memainkan peran yang semakin besar di perekonomian global. Pada tahun 2011 Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20 dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga Internasional.

Disisi lain, tantangan kedepan pembangunan Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia dipusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara yang maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, pemerintah harus membenahi beberapa aspek vital diantaranya terkait dengan kemajuan penggunaan teknologi yang tepat dalam proses produksi dan pemberdayaan sumber daya manusia (peningkatan kualitas tenaga kerja). Mengingat bahwa dua aspek (tingkat kemajuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja) menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa.

Saat ini kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Secara umum permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini antara lain pengangguran yang cukup tinggi, kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang relative rendah, serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, selain masih besarnya jumlah masyarakat penyandang kemiskinan. Sampai februari 2011 jumlah pengangguran terbuka mencapai 8,1 juta jiwa, sedangkan *underemployment rate* sampai februari 2011 mencapai 30,7%. Beban ini semakin tidak ringan dengan dihadapkannya bangsa ini pada

Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan Agustus 2008-Februari 2011

Kondisi Tenaga Kerja	Feb 2008	Agt 2008	Feb 2009	Agt 2009	Feb 2010	Agt 2010	Feb 2011
Penduduk Usia 15Thn (Juta Orang)	165,6	166,6	168,3	169,3	171	172,1	170,7
Angkatan Kerja (Juta Orang)	111,5	111,9	113,7	113,8	116	116,5	119,4
Pengangguran Terbuka	9,4	9,4	9,3	9	8,6	8,3	8,1
Bekerja	102	102,6	104,5	104,9	107,4	108,2	111,3
Bekerja Tidak Penuh Waktu	30,6	31,1	31,4	31,6	32,8	33,3	34,2
Setengah Mengganggu	16	16,2	16,4	16,2	17,5	18	18,5
Paruh Waktu	14,6	14,9	15	15,4	15,3	15,3	15,7
TK Pengangguran Terbuka (%)	9,8	8,4	8,1	7,9	7,4	7,1	6,8
<i>Underemployment Rate (%)</i>	30	30,3	30	30,1	30,5	30,7	30,7

Sumber: BPS 2010

era globalisasi, yang disatu sisi merupakan peluang, namun di lain sisi dapat menjadi ancaman bila tidak mempersiapkan diri. Perhatikan tabel berikut ini :

Dalam era globalisasi yang dikenal dengan liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa tenaga kerja, tenaga kerja Indonesia dituntut harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Persaingan bagi tenaga kerja diluar negeri, yang apabila tidak ditingkatkan kualitasnya maka kesempatan kerja yang ada didalam negeripun akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih baik dan lebih berkompeten. Dalam arus perdagangan bebas akan terjadi persaingan antar negara yang semakin ketat dan setiap negara dituntut untuk dapat berkompetisi. Agar hasil produksi barang dan jasa meningkat dan dapat bersaing, maka efisiensi dalam proses produksi perlu menjadi persyaratan utama yang harus dilakukan. Dan kata kunci dari efisiensi, adalah penggunaan teknologi yang tepat dan dikuasai oleh SDM yang ada. Untuk itu, dalam menghadapi globalisasi di bidang jasa tenaga kerja, bagaimana meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia guna mendukung suksesnya pembangunan nasional merupakan pokok permasalahan yang perlu dirumuskan kebijaksanaan, strategi, dan upayanya.

Untuk menjawab tantangan globalisasi yang ada, pemerintah telah menyiapkan MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). MP3EI merupakan program pemerintah yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan dan potensi yang dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus Indonesia hadapi. Dalam hal ini Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju. Sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan rencana strategis mengembangkan potensi ekonomi di wilayah enam koridor ekonomi. Memperkuat konektivitas nasional serta memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung program pengembangan koridor.

MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada 2025 melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Didalam pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan *breakthrough* atau terobosan inovasidan

kreasi yang didasari oleh semangat "*not business as usual*" yang memiliki arti bukan proyek atau bisnis yang biasa karena menyatukan pemerintah daerah di 33 provinsi, seluruh masyarakat Indonesia, serta seluruh kementerian republik Indonesia melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja.

Pokok permasalahannya adalah bagaimana gambaran umum MP3EI dan pentingnya pembangunan kualitas tenaga kerja di era globalisasi. Bagaimana peran strategis MP3EI sebagai upaya meningkatkan kualitas daya saing dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam era globalisasi. Bagaimana hambatan dan solusi dalam mengimplementasikan peran strategis MP3EI sebagai upaya meningkatkan kualitas daya saing dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam era globalisasi.

Definisi MP3EI

Pengertian MP3EI menurut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011) MP3EI didefinisikan sebagai rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dengan cara mengkoneksikan dan mengefektifkan pembangunan enam koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali – Nusa Tenggara, Sulawesi – Maluku Utara, dan Papua – Maluku yang memiliki tujuan sebagai peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi, serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam (SDA), geografis wilayah, dan sumber daya manusia (SDM) melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antarkawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Serta mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.

Secara teori pengertian daya saing menurut (Tumar Sumihardjo 2008) kata daya dalam kalimat daya saing bermakna kekuatan, dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain atau keunggulan tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka daya saing dapat bermakna kekuatan untuk

berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan seseorang, sekelompok atau institusi tertentu. Menurut (Dabla Norris, E.M Gradstein & G. Inchauste, 2007) daya saing adalah kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan pesaingnya oleh karena itu setiap perusahaan harus memiliki strategi bersaing dan keunggulan bersaing yang harus difokuskan pada proses yang dinamis.

Dalam teori globalisasi menurut (Malcom Waters 1998) adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran orang. Sedangkan menurut (Emmanuel Ritcher 2000) globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Berdasarkan kajian teori globalisasi menurut (Thomas L. Friedman 1997) Globalisasi memiliki dimensi ideology dan teknologi, dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain dengan model penelitian kajian pustaka dan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Dalam pemilihan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala tertentu pada objek kajian. Dalam hal ini penulis berusaha membuat gambaran mengenai konsep peran strategis MP3EI berbasis *not business as usual* untuk meningkatkan kualitas daya saing dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam era globalisasi.

Data dalam penulisan artikel ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, dan artikel dari internet. Adapun data sekunder bersumber dari situs internet Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKER) mengenai *masterplan* percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) serta ketenagakerjaan

negara Indonesia. Sumber kajian ini diharapkan dapat memperkuat dan mempertajam pembahasan.

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu pengumpulan data primer melalui telaah pustaka dari buku-buku dan jurnal yang relevan. Adapun pengumpulan data sekunder melalui situs internet Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKER).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum MP3EI dan Pentingnya Pembangunan Kualitas Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja suatu negara merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja dalam rangka mewujudkan ekonomi suatu negara yang lebih baik terutama dalam eraglobalisasi saat ini (Mair & Marti, 2006). Akan tetapi saat ini posisi Indonesia dalam persaingan pasar tenaga kerja global, terlalu lemah bersaing dengan negara maju, bukan karena hanya keterbatasan modal, teknologi, dan informasi akan tetapi juga masalah internal Indonesia yang masih sangat sulit untuk mengatasinya, antara lain masalah struktur penduduk dan angkatan kerja yang disebabkan oleh: (1) jumlah penduduk usia kerja mencapai hampir 119,4 juta jiwa dan 89,6 juta di antaranya masih memiliki latar belakang pendidikan dasar 66%, pendidikan menengah 30%, dan pendidikan tinggi hanya 4% (BPS, 2010). (2) adanya ketimpangan dalam aspek struktur dan aspek penawaran-permintaan (*supply-demand*), sehingga laju pertumbuhan angkatan kerja menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada.

Dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pemerintah telah menyiapkan program inti pembangunan yaitu MP3EI (*Masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia). Melalui pendekatan pembangunan koridor ekonomi (PKE), *Masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) memberikan tema baru bagi pembangunan ekonomi wilayah yaitu: MP3EI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, namun lebih pada penciptaan nilai tambah; MP3EI tidak

diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif. Hal ini memungkinkan semua wilayah di Indonesia untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing; MP3EI tidak menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh pusat, namun pada sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan kompetitif nasional; MP3EI tidak menekankan pembangunan transportasi darat saja, namun pada pembangunan transportasi yang seimbang antara darat, laut, dan udara; MP3EI tidak menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga pembangunan infrastruktur yang menekankan kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS).

Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui 6 koridor ekonomi Indonesia yang didasari oleh semangat “*not business as usual*”, melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja. Pelaksanaan strategi ini dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. 8 program utama, yaitu

pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Lihat Gambar 1 di bawah ini.

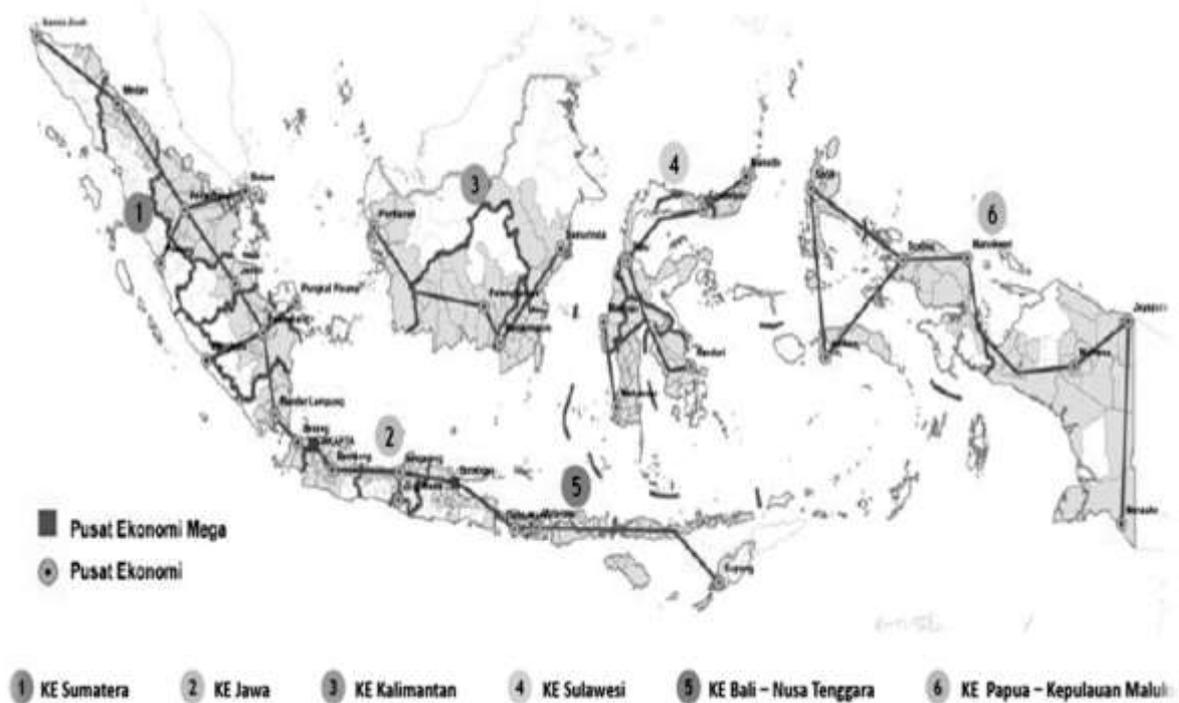
Strategi pelaksanaannya dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia, yaitu: koridor ekonomi Sumatera, koridor ekonomi Jawa, koridor ekonomi Kalimantan, koridor ekonomi Sulawesi, koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan koridor ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*), (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Perhatikan Gambar 2 di bawah ini.

Percepatan dan perluasan program ini ditujukan agar sumber daya alam dan manusia yang ada di masing-masing koridor dapat dikembangkan secara optimal agar dapat meningkatkan kualitas daya saing serta dapat menyerap tenaga kerja yang berkompeten. Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan



Sumber : Buku MP3EI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 1. Kegiatan Ekonomi Utama dalam MP3EI



Sumber : Buku MP3EI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 2. Peta Enam Koridor Ekonomi Indonesia

itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi terciptanya tenaga kerja Indonesia yang unggul dan berkompeten. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*) yang didasari oleh semangat “*not business as usual*”.

Peran Strategis MP3EI sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Era Globalisasi

MP3EI (*Masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi tingginya angka pengangguran tenaga kerja muda di Indonesia (antaranews.com Selasa, 15 Mei 2012). Menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala BAPPENAS Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan tingkat pengangguran kaum muda di Indonesia saat ini masih relatif tinggi meskipun secara nasional tingkat pengangguran terbukanya sudah menurun. Jika dilihat sekarang, tingkat

pengangguran rata-rata nasional sudah lebih rendah, dari sebelumnya total pengangguran sebesar 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 6,56 persen pada tahun 2011, tetapi tingkat pengangguran kaum mudanya masih relatif tinggi, Tingkat pengangguran kaum muda setidaknya tiga kali lipat dari angka rata-rata pengangguran nasional. Pada tahun 2011 angka pengangguran muda saat ini mencapai 19,99 persen dan jumlahnya masih sekitar 4,2 juta orang. Di sisi lain, Indonesia ternyata masih kekurangan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan pasar kerja.

Pengembangan 6 koridor ekonomi dalam MP3EI memberikan potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. Pengembangan kegiatan utama dan kegiatan pendukung pada enam koridor MP3EI diperkirakan mampu menciptakan 9.437.918 lapangan kerja dengan total investasi Rp3.775,9 triliun. Jumlah lapangan kerja tersebut terbagi atas kegiatan utama dalam hal ini industri sebesar 4.731.770 lapangan kerja dan kegiatan pendukung dalam hal ini sektor infrastruktur sebesar 4.975.400 lapangan kerja. Perhatikan tabel berikut ini,



Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Koridor Ekonomi Kalimantan

Koridor	Sektor/sub sektor	Rencana investasi (dalam triliun Rp.)	Perkiraan penyerapan tenaga kerja
Kalimantan	1. Besi Baja	37,0	41.948
	2. Bauksit	137,0	155.320
	3. Kelapa Sawit	48,0	374.123
	4. Batubara	181,0	205.204
	5. Migas	344,0	390.001
	6. Perakayuan	32,0	575.954
	JUMLAH	779,0	1.742.550

Sumber: Sarasehan Nasional BAPPENAS, 2012

Perkiraan penyerapan tenaga kerja terbanyak untuk kegiatan utama pada koridor ekonomi tahun 2012-2014 terdapat di koridor Kalimantan sebesar 1.742.550 orang dengan sektor unggulan besi baja, bauksit, kelapa sawit, batu bara, migas dan perakayuan.

Koridor Sumatera diperkirakan dapat menyerap 579.973 orang dengan sektor unggulan besi baja, perkapalan, kelapa sawit, karet, batubara, dan jembatan selat sunda.

Koridor Jawa sendiri akan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 340.938 orang dengan sektor

unggulan makanan minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, Jabodetabek Area, dan pertahanan/alutsista.

Selanjutnya, koridor Sulawesi akan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 460.940 orang dengan sektor unggulan nikel, pertanian, migas, kakao dan perikanan.

Sedangkan koridor Bali-Nusa Tenggara diperkirakan mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebesar 144.851 orang dengan tiga sektor unggulan, yakni pariwisata, peternakan dan perikanan.

Tabel 3. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Koridor Ekonomi Sumatera

Koridor	Sektor/sub sektor	Rencana investasi (dalam triliun Rp.)	Perkiraan penyerapan tenaga kerja
Sumatera	1. Besi Baja	64,0	72.558
	2. Perkapalan	7,0	22.071
	3. Kelapa Sawit	44,0	342.946
	4. Karet	3,0	23.383
	5. Batu Bara	32,0	36.279
	6. JSS (Jembatan Selat Sunda)	150,0	82.736
	JUMLAH	300,0	579.973

Sumber: Sarasehan Nasional BAPPENAS, 2012

Tabel 4. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Koridor Ekonomi Jawa

Koridor	Sektor/sub sektor	Rencana investasi (dalam triliun Rp.)	Perkiraan penyerapan tenaga kerja
Jawa	1. Makanan Minuman	25,0	64.747
	2. Tekstil	9,0	100.223
	3. Peralatan Transportasi	32,0	52.914
	4. Perkapalan	9,0	28.377
	5. Telematika	4,0	797
	6. Jabodetabek Area	352,0	70.120
	7. Pertahanan /Alusista	2,0	20.760
	JUMLAH	433,0	340.938

Sumber: Sarasehan Nasional BAPPENAS, 2012

Tabel 5. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi

Koridor	Sektor/sub sektor	Rencana investasi (dalam triliun Rp.)	Perkiraan penyerapan tenaga kerja
Sulawesi	1. Nikel	100,0	113.372
	2. Pertanian Pangan	19,0	148.090
	3. Migas	68,0	77.093
	4. Kakao	1,0	7.794
	5. Perikanan	9,0	114.591
	JUMLAH	197,0	460.940

Sumber: Sarasehan Nasional BAPPENAS, 2012

Tabel 6. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara

Koridor	Sektor/sub sektor	Rencana investasi (dalam triliun Rp.)	Perkiraan penyerapan tenaga kerja
Bali- Nusa Tenggara	1. Pariwisata	58,0	99.145
	2. Peternakan	7,0	32.974
	3. Perikanan	1,0	12.732
	JUMLAH	66,0	144.851

Sumber: Sarasehan Nasional BAPPENAS, 2012

Tabel 7. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Koridor Ekonomi Papua- Kepulauan Maluku

Koridor	Sektor/sub sektor	Rencana investasi (dalam triliyun Rp.)	Perkiraan penyerapan tenaga kerja
Papua-Kepulauan Maluku	1. Nikel	83,0	94.099
	2. Tembaga	197,0	223.343
	3. Pertanian Pangan	89,0	693.687
	4. Migas	50,0	56.686
	5. Perikanan	31,0	394.703
	JUMLAH	450,0	1.462.518

Sumber: Sarasehan Nasional BAPPENAS, 2012

Kemudian yang terakhir, koridor Papua-Kepulauan Maluku mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.462.518 orang dengan sektor unggulan nikel, tembaga, pertanian, migas dan perikanan. Dari keseluruhan koridor ekonomi kebutuhan tenaga kerja terbesar berasal dari koridor ekonomi Kalimantan yang mencapai 1,7 juta orang dengan investasi Rp779 triliun, diikuti koridor Papua-Maluku sebesar 1,4 juta orang dengan investasi Rp450 triliun, koridor Sumatera sebanyak 579 ribu orang dengan investasi Rp300 triliun, koridor Sulawesi sebesar 460 ribu orang dengan investasi Rp 197 triliun, koridor Jawa sebesar 340 ribu orang dengan investasi Rp433 triliun dan koridor Bali-Nusa tenggara sebesar 144 ribu orang dengan investasi Rp56 triliun.

Untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dalam mendukung program MP3EI diperlukan peningkatan kualitas dan kemampuan SDM untuk meningkatkan daya saing. Dimana Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era globalisasi ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan industri di KPI melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha/asosiasi profesi, dan lembaga diklat (pemerintah dan swasta);
2. Menghasilkan tenaga kerja yang bisa beradaptasi dan terampil, melalui: Langkah-langkah sistematis untuk menjamin agar Kualitas Pelatihan dan *Skills* yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja. Pemenuhan standar, mulai kurikulum, tempat pelatihan, proses ujian dan sertifikasi;
3. Menyiapkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan di koridor ekonomi sesuai sektor yang dikembangkan;
4. Meningkatkan jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan industri, asosiasi para profesional, lembaga sertifikasi yang difasilitasi oleh pemerintah;
5. Meningkatkan keahlian manajerial dan profesional diatasi dengan kurikulum dan pelatihan di tempat kerja. Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyesuaian bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Program akademik diharapkan mampu menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dan kualitas daya saing tenaga kerja dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi. Universitas sebagai pusat riset dikembangkan secara nasional sebagai bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan universitas pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, *resource sharing*, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan

lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing-masing koridor ekonomi. Di setiap kabupaten/kota minimal harus dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (*community college*) atau politeknik dengan bidang-bidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut.

Hambatan dan Solusi dalam Mengimplementasikan Peran Strategis MP3EI sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Era Globalisasi

Salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI adalah peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional. Sebagai salah satu strategi utama, peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional dinilai sangat penting mengingat pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dengan demikian peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, mau tidak mau tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan. Haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dengan kata lain, pendidikan haruslah menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (lihat Dokumen MP3EI, www.bappenas.go.id). Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sebagaimana digariskan dalam rencana induk tersebut sudah tentu bukan semata diupayakan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi seperti ditargetkan. Dengan melakukan pelatihan, pemerintah menargetkan akan lahir 4,8 juta tenaga kerja muda baru (*youth employment*) hingga 2014. Rahma Iriyanti, Direktur tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja Kementerian perencanaan pembangunan Nasional, mengatakan pelatihan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda. Program pelatihan yang akan dilakukan pemerintah tersebut merupakan

program strategis penciptaan lapangan kerja muda yang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala dalam segi kemampuan SDM dan IPTEK seperti,

A. Segi Pendidikan

1. Masih terfokusnya pendidikan di koridor ekonomi Jawa,

Koridor ekonomi Jawa, memiliki kota-kota besar yang sudah maju yang letaknya dekat pusat pemerintahan Indonesia, sistem pendidikannya berkembang dengan pesat. Sekolah-sekolah umum negeri memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan akses pendidikan yang baik dan mudah. Sistem pendidikan yang diterapkan pun beragam dan dianggap sesuai dengan perkembangan era globalisasi yang menuntut kompetensi yang baik. Sekolah internasional, *homeschooling* dan sekolah umum negeri yang memiliki sistem pendidikan yang maju seperti kelas internasional dan akselerasi ditawarkan hanya berada di koridor ekonomi Jawa. Setiap orang tua dapat dengan mudah memilih sekolah yang diinginkan dengan sistem pendidikan yang paling tepat atau dianggap cocok untuk anak-anaknya. Sementara itu, di luar koridor ekonomi Jawa contohnya Sumatera, Sulawesi, Papua-Kepulauan Maluku dan Kalimantan, masih banyak sumber daya manusia yang belum mendapatkan pendidikan dengan baik karena kekurangan guru, ruang kelas yang tidak layak dan akses ke sekolah yang sulit ditempuh. Jangankan untuk mengembangkan sistem pendidikan di sekolah, untuk memperbaiki gedung saja dananya tidak ada.

2. Masih lemahnya akses pendidikan di masing-masing koridor,

Selain masih terfokusnya pendidikan di koridor ekonomi Jawa, akses pendidikan di masing-masing koridor menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia karena hampir 2/3 angkatan kerja di seluruh koridor ekonomi masih berpendidikan SD kebawah, maka upaya peningkatan tingkat pendidikan adalah melalui pendidikan masal, yaitu melalui wajib belajar 9 tahun. Namun program ini terkesan tidak sepenuh hati, pemerintah mewajibkan belajar warganya 9 tahun, tetapi tidak

dibarengi dengan aturan tegas bagaimana bila orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, apakah pemerintah akan memberikan beasiswa karena kenyataan wajib belajar 9 tahun tidak gratis meski oleh pemerintah dikatakan gratis. Dengan demikian, selain perlunya meningkatkan mutu pendidikan, juga perlu meningkatkan akses pendidikan. Padahal, pendidikan yang berkualitas perlu biaya tinggi.

3. Sistem pendidikan yang belum berbasis kompetensi dan keunggulan di masing-masing koridor,

Saat ini sistem pendidikan di masing-masing koridor belum berbasis kompetensi dan keunggulan hal ini dibuktikan dengan fakta yang menunjukkan masih rendahnya kuantitas sekolah yang memfokuskan pengajaran dalam pengembangan keunggulan di masing-masing koridor ekonomi. Seperti koridor ekonomi Jawa yang memfokuskan pada pengembangan industri dan jasa nasional tetapi kurang memiliki lembaga pendidikan yang membidangi perkapalan, makanan-minuman, alusista, dan peralatan transportasi. Di koridor Sumatera masih rendahnya lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan atau *skill* dalam bidang pengolahan besi-baja, kelapa sawit, dan batu-bara. Hal ini juga terjadi di masing-masing koridor ekonomi yang lainnya sehingga memberi dampak kurangnya keahlian tenaga kerja di sektor unggulan masing-masing koridor sehingga keunggulan tersebut tidak teroptimalkan dengan baik.

B. Segi Pelatihan

1. Rendahnya kaderisasi pelatihan,

Rendahnya kaderisasi pelatihan menjadi kendala dalam pengembangan SDM dan IPTEK di seluruh koridor ekonomi Indonesia, fakta menunjukkan kaderisasi tenaga instruktur pelatihan di balai latihan kerja (BLK) oleh pemerintah daerah (PEMDA) masih belum efektif, karena masih banyak PEMDA yang belum menyadari pentingnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) melalui kaderisasi tenaga instruktur BLK yang berfungsi mencetak SDM tenaga kerja yang berkualitas. "Kebanyakan keberadaan BLK di daerah bukan menjadi program unggulan oleh PEMDA. Justru program yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi program unggulan PEMDA. hal ini karena rendahnya kesadaran PEMDA akan pentingnya BLK sebagai

investasi dalam mencetak SDM tenaga kerja yang berkualitas.

2. Rendahnya penggunaan IPTEK dalam pelatihan,

Penggunaan IPTEK dalam pelatihan merupakan langkah penting agar suatu BLK di masing-masing koridor dapat mengembangkan suatu inovasinya. Namun fakta menunjukkan tidak semua BLK di masing-masing koridor ekonomi menggunakan IPTEK dalam pelatihannya hal ini dikarenakan masih sulitnya SDM yang mampu menggunakan IPTEK dalam pengelolaan BLKnya. Sebagai contohnya adalah website pelatihan BLK pembuat *merchandise* khas Jogja yang ada di koridor ekonomi Jawa dan *merchandise* khas Bali yang ada di koridor Bali dipasarkan melalui internet, maka tidak hanya orang Jogja dan Bali saja yang mengetahui produknya, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri sekali pun sehingga banyak konsumen yang tertarik dan pada akhirnya ingin mengunjungi langsung. Namun hal ini berbeda dengan kondisi BLK yang ada di koridor ekonomi Papua, pelatihan BLK di raja ampas Papua juga membuat *merchandise* khas raja ampas namun pemasaran hanya sebatas pulau raja ampas saja dikarenakan kurangnya penggunaan IPTEK dalam BLK raja ampas, Papua.

3. Rendahnya investasi infrastruktur pelatihan,

Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelatihan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung gerak roda pemerintahan dan perekonomian di seluruh koridor ekonomi, namun investasi infrastruktur untuk program pelatihan 2011 masih jauh dari memadai, yaitu sekitar 4% dari Produk Domestik Bruto/PDB (sumber: Bappenas) dari minimal kebutuhan sekitar 5% PDB. Hal ini mengakibatkan banyaknya balai latihan kerja (BLK) yang belum teroptimalkan sehingga memberi dampak yaitu masih banyaknya pengangguran di masing-masing koridor ekonomi. Disamping itu, kapasitas lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah yang berwenang juga masih lemah dan banyak menimbulkan masalah. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari penyiapan proyek yang tidak "*bankable*". Kelemahan tersebut diperbesar dengan adanya proses desentralisasi yang tidak berjalan dengan

baik, kelemahan koordinasi serta kurang tegasnya pembagian peran dan kewenangan diantara lembaga pemerintah yang terkait. Kelemahan ini menyebabkan proses penyiapan proyek kerjasama pemerintah-swasta (KPS) memakan waktu lama.

Melihat permasalahan diatas dari segi pendidikan dan pelatihan sepertimasih terfokusnya pendidikan di koridor ekonomi Jawa, masih lemahnya akses pendidikan di masing-masing koridor, sistem pendidikan yang belum berbasis kompetensi dan keunggulan di masing-masing koridor serta rendahnya kaderisasi pelatihan, rendahnya penggunaan IPTEK dalam pelatihan, rendahnya investasi infrastruktur pelatihan. Oleh karena itu diperlukan solusi nyata dalam merealisasikan peran strategis MP3EI untuk meningkatkan kualitas daya saing dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam era globalisasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi otonomi daerah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di masing-masing koridor,

Untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di seluruh koridor ekonomi diperlukan asas dalam mengelola daerah yang meliputi desentralisasi pelayanan kepada masyarakat atau publik. Untuk memudahkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat atau publik diperlukan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, akan tercipta suatu otonomi pendidikan yang mampu mengatur sistem pendidikan di suatu daerah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing koridor ekonomi Indonesia.

Indonesia memiliki posisi penting dalam era globalisasi, sehingga sudah saatnya setiap daerah melaksanakan program pendidikan yang terbaik di masing-masing koridornya. Sedangkan pemerintah pusat hanya membuat regulasi dan memberikan pengawasan serta bertanggung jawab sepenuhnya bagi terlaksana pendidikan nasional tersebut sebaik mungkin. Otonomi pendidikan sangat tepat dilaksanakan, karena persoalan serta kendala terlaksananya program pendidikan di setiap koridor pada umumnya berbeda-beda. Otonomi pendidikan harus dilakukan, mengingat kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah di setiap koridor juga berbeda-beda. Dengan

otonomi pendidikan yang dilakukan di setiap koridor, pendidikan di setiap koridor akan semakin berkembang pesat.

2. Mengembangkan konsep “one corridor one potensial school” untuk mengoptimalkan masing-masing koridor ekonomi.
3. Regenerasi kader dan pelatihan bertahap untuk calon kader pelatih balai latihan kerja (BLK).
4. Meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam investasi infrastruktur pelatihan melalui implementasi otonomi daerah,

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, adalah dengan cara merespon dukungan yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka pembangunan infrastruktur tiap-tiap sektor koridor ekonomi. Diantara beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam kaitannya dengan paket kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur adalah penerapan prinsip-prinsip kerjasama dalam penyediaan infrastruktur yang diatur melalui peraturan presiden (Perpres) nomor 67 tahun 2005, tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Disadari bahwa dalam penyediaan infrastruktur ditegarai oleh adanya keterbatasan keuangan negara, yang oleh karenanya diperlukan kerjasama pemerintah dan swasta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas lingkungan (komunitas) dan balai latihan kerja. Kerjasama ini dicirikan oleh adanya pembagian resiko, kewenangan dan tanggung jawab, serta pembagian hasil usaha yang adil dari mereka yang bermitra.

KESIMPULAN DAN SARAN

Globalisasi bukan lagi menjadi isu tetapi sudah menjadi kenyataan yang dihadapi oleh semua bangsa termasuk Indonesia. Era global dapat menjadi peluang, tantangan, sekaligus juga menjadi ancaman. Untuk menjawab peluang dan tantangan itu negara Indonesia harus membenahi aspek vital diantaranya terkait dengan kemajuan teknologi yang tepat dalam proses produksi dan pemberdayaan sumber daya manusia (peningkatan kualitas tenaga kerja). Melihat fenomena tersebut dibutuhkan MP3EI (*Masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) berbasis “*not business as*

usual” sebagai salah satu langkah strategis pendukung, untuk meningkatkan kualitas daya saing dan penyerapan tenaga kerja dalam era globalisasi.

Pengembangan enam koridor ekonomi dalam MP3EI memberikan potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. pengembangan kegiatan utama dan kegiatan pendukung pada enam koridor MP3EI diperkirakan mampu menciptakan 9.437.918 lapangan kerja dengan total investasi Rp3.775,9 triliun. Jumlah lapangan kerja tersebut terbagi atas kegiatan utama dalam hal ini industri sebesar 4.731.770 lapangan kerja dan kegiatan pendukung dalam hal ini sektor infrastruktur sebesar 4.975.400 lapangan kerja. Namun dalam pelaksanaan peran strategis MP3EI ini masih terdapat kendala dalam segi kemampuan SDM dan IPTEK seperti, masih terfokusnya pendidikan di koridor ekonomi Jawa, masih lemahnya akses pendidikan, rendahnya kaderisasi pelatihan, rendahnya penggunaan IPTEK dalam pelatihan, rendahnya investasi infrastruktur pelatihan. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi kongkret seperti optimalisasi otonomi daerah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di masing-masing koridor, mengembangkan konsep “*one corridor one potensial school*” untuk mengoptimalkan masing-masing koridor ekonomi, regenerasi kader dan pelatihan bertahap untuk calon kader pelatih balai latihan kerja (BLK), meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam investasi infrastruktur pelatihan melalui implementasi otonomi daerah.

Jika kita menyimak lebih dalam pemerintah seharusnya mengembangkan kluster inovasi balai latihan kerja sebagai *center of excellence* di masing-masing koridor ekonomi. Mengembangkan universitas, politeknik, dan *community college* yang memiliki program studi serta kurikulum yang spesifik di setiap koridor ekonomi. Mengembangkan PUSPITEK ketenagakerjaan sebagai layanan umum dengan manajemen profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam hal teknologi. Menciptakan penguatan aktor inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah di masing-masing koridor ekonomi. Mengadakan kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai *best practices*

yang dapat dikembangkan di seluruh koridor ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauder, Harald. 2006. The segmentation of academic labour: A Canadian example. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 4 (2): 228–39.
- Danim Sudarwan. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dabla-Norris, E., M. Gradstein, and G. Inchauste. 2007. competitiveness and strategy in globalization. Journal of Development Economics.
- Guscina, Anastasia, 2006, “Effects of Globalization on Labor’s Share in National Income,” IMF Working Paper 06/294 (Washington: International Monetary Fund).
- http://datakesra.menkokesra.go.id/sites/default/files/pendidikan_file/human_development_index_2011.pdf (diakses pada 16 Mei 2012 pukul 15:30 wib).
- <http://pusbinsdi.net/news.php?op=news&page=detail&id=12> (diakses pada 17 Mei 2012 pukul 14:27 wib).
- <http://www.bappenas.go.id/node/165/3532/sarasehan-nasional-meningkatkan-kualitas-tenaga-kerja-muda-menuju-indonesia-maju-2025/> (diakses pada 02 Mei 2012 pukul 21:34 wib).
- <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/> (diakses pada 02 Mei 2012 pukul 23:52 wib).
- http://bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=06 (diakses pada 03 Mei 2012 pukul 18:40 wib).
- Imron Bashori M. 2001. *Penyiapan Tenaga Kerja Di Era Global*. Jakarta : LIPI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Hasil Saresehan Nasional Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Muda Menuju Indonesia Maju 2025*. Jakarta : Bappenas.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2011. *Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2011*. Jakarta : Depnaker.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan*

- Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025*. Jakarta : Kemenko.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Bappenas.
- Kucera, David. 2002. Core Labour Standards and Foreign Direct Investment. *International Labour Review* 141, no. 1 / 2: 31-69.
- Mair, & Marti. 2006. Labor force research: A source of explanation, prediction, and solutions. *Journal of World Business*, 41, 36–44.
- Sumarsono Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.